

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Skripsi ini bertujuan untuk membongkar diskursus kekuasaan yang beroperasi dalam monarki Inggris dan ia akan dianalisis menggunakan pendekatan genealogi kekuasaan Michel Foucault untuk mengungkap kekuasaan tersebut. Hal yang menarik dari *United Kingdom* (UK) saat ini bukan hanya sejarah besar atas kemenangannya di masa lalu, namun lebih dari pada itu, terlepas dari kuatnya arus globalisasi dan modernisasi hingga saat ini *United Kingdom* atau Britania Raya masih memimpin sekitar 53 negara di dunia yang tergabung dalam *Commonwealth Nations* dengan ratu Elizabeth menjabat sebagai kepala negara bagi 16 negara anggota juga menambah keunikan monarki Inggris.

Bisa dikatakan bahwa tak ada satupun aktor hegemon regional yang memiliki masa-masa yang mudah selama periode dominasinya, tetapi London pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 lebih berhasil dalam mempertahankan “muridnya” dan mencegah separatisme dan pemberontakan terhadap kepentingannya daripada Washington dan Moscow. Tak terpungkiri pula bahwa konstelasi politik dan dinamika sejarah Eropa tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Inggris ataupun Britania Raya (UK) secara keseluruhan yang hingga kini masih merupakan salah satu aktor pemimpin dalam ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan keamanan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari fakta bahwa Inggris merupakan hegemon global yang memikul peran sebagai polisi dunia, sebelum akhirnya gelar *police force* tersebut digantikan oleh Amerika Serikat, di mana era tersebut dikenal sebagai *Pax Britannica* (Abelardo 2019, 21).

Gambar 1. Pax Britannica (British Empire 1886)



Sumber : Starkey 2006.

Selama seribu tahun terakhir, kekuatan politik di Inggris telah berpindah dari *Absolute Monarch*, yang memerintah berdasarkan '*Divine Right of Kings*,' memberikan separuh kekuasaannya kepada Parlemen. Pada awalnya Parlemen dimulai sebagai badan bangsawan dan pendeta terkemuka yang dikonsultasikan oleh Raja atau Ratu dalam pelaksanaan kekuasaan, yang secara bertahap mengambil alih kekuasaan yang semakin banyak dengan memotong kekuasaan Raja atau Ratu dari yang absolut menjadi simbolik, yang berpuncak pada '*Glorious Revolution of 1689*.' Pada *The 1701 Act of Settlement*, secara kritis, menyerahkan kekuasaan untuk memutuskan suksesi takhta kepada Parlemen. Terlihat bahwa ada perbedaan antara kekuasaan yang dijalankan oleh monarki baik oleh Raja atau Ratu dan yang dipegang oleh perdana menteri (Powel 1994, 122).

Di antara monarki konstitusional dunia, ada dua yang berada di kelasnya sendiri dalam hal jangkauan, pengaruh, dan kepentingan publik global mereka. Mereka adalah

Kepausan dan *United Kingdom* atau dulunya masih bernama Kerajaan Inggris atau *British Empire*. Sebagai monarki, kondisi geografis UK ialah kepulauan yang menanungi empat wilayah di bawahnya yaitu daratan utama Inggris atau England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Dengan kata lain, Inggris merupakan bagian daripada monarki Britania Raya. Hal tersebut kemudian yang membedakan Inggris dengan negara monarki yang lain. Banyak yang menganggap bahwa Buckingham mempertahankan posisinya melalui kekuatan militer, tetapi nyatanya komitmen militer Inggris jauh lebih kecil daripada Amerika Serikat. Wilayah koloni Inggris pun tersebar mulai dari Mediterania, Asia, Pasifik hingga Afrika terdapat kurang lebih 174 wilayah yang ada di bawah kekuasaan Inggris pada masa *Pax Britannica* (Hyam 2002, 136)

Hubungan Inggris sendiri dengan tanah Eropa justru kurang begitu baik sebab identitasnya sebagai negara kepulauan semakin merenggangkan ikatan serta rasa mempunyai dengan negara Benua Eropa. Namun saat sesudah Perang Dingin, Inggris memandang Eropa mempunyai kiprah penting dalam kepentingan negaranya, sebagai akibatnya Inggris berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara Eropa saat di masa kepemimpinan Tony Blair (Rubinstein 2004, 104). Selain itu, Inggris memfokuskan kebijakan luar negerinya melalui cara menjalin hubungan dengan negara – negara bekas koloninya. Melalui *Commonwealth of Nations*, kepentingan – kepentingan Inggris pada aneka macam aspek seperti ekonomi, politik, sosial, serta budaya dapat tercapai, hal ini dapat ditinjau dengan digagasnya *Commonwealth Free Trade Zone*, di mana merupakan rencana integrasi pasar antarnegara – negara anggota *Commonwealth of Nations* (Shaw 2008, 45)

Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa negara yang tergabung dalam Kerajaan Inggris lambat laun memperoleh kebebasan dari Inggris dan membentuk negara mereka sendiri. Negara-negara tersebut dikenal dengan sebutan *Dominions* atau negara semi-

independen. Kebijakan tradisional Inggris yang mengizinkan pemerintahan sendiri yang cukup besar di wilayah bekas koloninya tersebut mengarah pada keberadaan beberapa *dependent states* pada abad ke-19 yang dihuni secara signifikan oleh orang Eropa yang terbiasa dengan bentuk-bentuk pemerintahan parlementer dan yang memiliki ukuran kedaulatan yang besar. Bisa disimpulkan bahwa secara historis, negara-negara Persemakmuran Inggris adalah hasil evolusi monarki Inggris.

Persemakmuran Bangsa-Bangsa berbeda dari *international embodies* lainnya sebab tidak memiliki konstitusi atau anggaran rumah tangga secara formal. Mengutip dari laman *The Common Wealth*, dilansir bahwa *Commonwealth* merupakan salah satu organisasi politik tertua dalam lingkup internasional. Ada 54 negara di Persemakmuran Bangsa-Bangsa, di semua benua mulai dari Barat Afrika, ke Eropa, ke Asia, ke Amerika dan Karibia, dan terpencah ke seluruh wilayah Pasifik termasuk Australia. Negara-negara Persemakmuran beragam - mereka termasuk negara terbesar, terkecil, terkaya dan termiskin di dunia. anggota *Commonwealth* memiliki populasi gabungan sekitar 2,4 miliar orang, hampir sepertiga dari populasi dunia, 1,37 miliar di antaranya tinggal di India atau 94% tinggal di Asia dan Afrika jika digabungkan (Bayly 1994, 15).

Setelah India, negara Persemakmuran terbesar berikutnya berdasarkan jumlah penduduk adalah Pakistan (220 juta), Nigeria (170 juta), Bangladesh (156 juta), dan Inggris (65 juta). Menurut data yang peneliti lansir dari halaman resmi CIA, Tuvalu merupakan anggota terkecil, dengan sekitar 10.000 orang. Luas daratan negara-negara Persemakmuran adalah sekitar 31.500.000 km² (12.200.000 mil persegi), atau sekitar 21% dari total luas daratan dunia. Dua negara Persemakmuran terbesar berdasarkan luas wilayah adalah Kanada pada 9.984.670 km² (3.855.100 mil persegi) dan Australia di 7.617.930 km² (Central Intelligence Agency 2009)

Para anggota tidak memiliki kewajiban hukum atau formal satu sama lain melainkan mereka disatukan oleh sebuah ikatan yang lebih dalam lagi yang sering dijabarkan oleh para ahli sebagai ikatan tradisi, institusi, dan pengalaman bersama serta oleh kepentingan ekonomi pribadi. Tindakan Persemakmuran didasarkan pada konvensi antaranggota, yang dilakukan melalui korespondensi serta melalui dialog dalam rapat. Setiap negara anggota mengirimkan seorang utusan, yang diklaim komisaris tinggi, ke ibu kota anggota lainnya. *Rendezvous* kepala pemerintah anggota Persemakmuran diadakan setiap 2 tahun. Pada pertemuan di Singapura tahun 1971, para anggota mengadopsi deklarasi yang menyatakan kembali sifat sukarela serta kooperatif Persemakmuran dan berkomitmen di organisasi untuk mempromosikan perdamaian internasional, memerangi rasisme, menentang dominasi kolonial, serta mengurangi ketidakadilan dalam kekayaan.

Dua negara anggota di Persemakmuran yang sebelumnya belum pernah dijajah baik secara langsung atau tidak langsung oleh Inggris ialah Mozambik dan Rwanda. Kesukarelaan 2 negara *non-colonized* Inggris anggota *Commonwealth* tersebut menambah salah satu argumen terhadap pemikiran kaum realis ataupun penganut keamanan tradisional tentang teori kekuasaan dan penaklukan yang cenderung mengandalkan *hard power*, dan bersifat represif atau koersif. Namun interdependensi yang dijabarkan oleh liberal juga tidak dapat dijadikan alasan mutlak mengapa Mozambik dan Rwanda ingin bergabung pada Persemakmuran negara-negara bekas kolonial Inggris yang tetap bertahan di bawah kaki Inggris. Anggota DPR Rwanda sekaligus Duta Besar Rwanda untuk PBB dan UK yakni Gideon Kayinamura berkata (Kayinamura 2009):

“One of the characteristics of Commonwealth member states is the use of the English language. Rwanda introduced English as an official language in 1994, and English, French and Kinyarwanda are the country’s official languages. In October 2008, the government decided English would be the medium of instruction in all schools from primary to tertiary levels of education. It’s also a requirement for all civil servants and government officials to start using English as a matter of “priority”. So that’s one of the major reasons”

Bahwa merupakan keinginan Rwanda untuk belajar banyak hal dari negara-negara anggota Persemakmuran dan menyumbangkan pengalamannya sendiri. Selain dari motif ekonomi, ternyata salah satu motif besar mengapa Rwanda ingin bergabung ialah terkait keinginan untuk penguatan penggunaan Bahasa Inggris dalam negerinya (McIntyre 2008, 85)

Wacana atau diskursus, kekuasaan, dan sejarah digabungkan menjadi triangulasi yang dianggap unik dan khas dalam meneliti fenomena atau isu klasik ataupun fenomena atau isu kontemporer. Sebab secara khusus karya Michel Foucault telah menempatkan klaimnya secara tak terbantahkan pada ketiga hal tersebut. Hal itu masih terjadi, bahkan setelah masa kejayaan peralihan linguistik. Penggunaan istilah wacana Foucault dan penjabarannya tentang gagasan pengetahuan atau kekuasaan juga mendorong arus baru karya sejarah, di mana khususnya pertanyaan tentang 'praktik' muncul ke depan. Dalam penelitian ini, hubungan antara wacana, kekuasaan, dan sejarah, mungkin agak mengherankan, dihadapkan pada salah satu subjek historiografi tertua dan paling tradisional yaitu monarki.

Dalam *Talking of the Royal Family*, Michael Billig menganalisis mengenai *attraction* yang sangat kuat yang dipancarkan oleh monarki Inggris saat ini. Ilusi¹, yang selama berabad-abad dipentaskan oleh rombongan kerajaan, dipecah dan dibongkar menjadi delusi-delusi² lainnya. Terbukti dengan masih banyaknya masyarakat, terlepas dari demistifikasi dunia modern saat ini, ingin mempertahankan hal-hal ini: Yaitu takhta dan mahkota serta perhiasan layak dan seharusnya menjadi bagian sang raja serta ratu;

¹ Definisi Ilusi yang dimaksud ialah sama dengan definisi ilusi yang diungkapkan Amartya Sen dalam *The Illusion of Destiny* (2006) yang mana ilusi diartikan sebagai suatu yang diperlihatkan sebagai kebenaran dan identitas yang dijunjung tinggi dan tidak perlu dipertanyakan asal-usulnya (Chakrabarty 2009).

² Merujuk *Delusions, Investigation into the Psychology of Delusional Reasoning*, definisi delusi di sini ialah keyakinan yang tidak normal terhadap realitas (Chakrabarty 2009).

Percaya bahwa keberhasilan raja Arthur bergantung pada Merlin dan *Excalibur*; signifikansi tradisi dan mistik yang kental. Jadi, pada waktu yang sama kita dihadapkan pada demistifikasi³ dan modernisasi serta tuntutan mistifikasi dan tradisi yang secara sadar terus menerus. Selain itu, hal ini juga mengarah pada kecenderungan untuk mengabaikan banyak praktik dan suara yang tidak menghasilkan sistematisasi modernitas yang beralasan, tetapi sering kali mengorganisir ruang dan bahasa dan menggunakan kekuatannya secara tidak terlihat dan terdengar.

Queen Elizabeth (sebagai personifikasi mahkota) tidak diragukan lagi merupakan sebuah “*global personality brand.*” Sang Ratu dianggap “*Not only British Monarch but is also a monarch*” karena dalam kapasitas pribadi atau personal di luar nama "Inggris" merupakan Ratu dari lima belas negara monarki lain termasuk Kanada, dan Selandia Baru. Sang Ratu juga merupakan tituler kepala Persemakmuran. Satu-satunya organisasi lain yang sebanding dengan Persemakmuran adalah *La Francophone*; komunitas berbahasa Prancis dari 47 negara (Abelardo 2019, 39).

Strategi Inggris dalam wujud Monarki untuk lebih dekat dengan kolonialnya juga bisa jadi melalui proses mengevaluasi kebijakan ketat kedua kolonial pendahulunya dengan sesuatu yang akomodatif dan liberal demi kepentingan ekonomi berkelanjutan. Kepentingan ekonomi menjadi dasar, mayoritas dan primer bagi pihak kolonial. Sebelumnya Portugis ketat dalam wacana pendisiplinan melalui kepatuhan ajaran agama dan Belanda yang ketat pada monopoli perdagangan. Namun seni atau cara-cara akomodatif pihak Inggris menghasilkan kekuatan dalam arti yang produktif dengan elit lokal. Strategi penyediaan pihak Inggris menghasilkan kekuatan dalam arti produktif

³ Demistifikasi dalam hal ini yang dimaksud ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang mulai tidak percaya dan mengabaikan hal-hal mistik. Sedangkan mistifikasi merupakan kebalikannya, yaitu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang terus menerus mengkaitkan dan percaya pada hal-hal mistik (Bowker 1973).

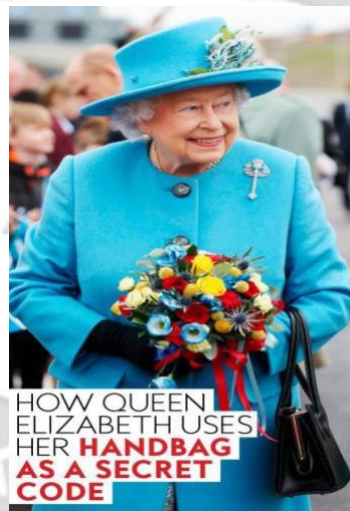
dengan elit lokal. Relasi pihak Inggris dengan elit lokal merupakan relasi *par excellence* (Jorgensen, Marianne and Philips 2007, 329)

Pengetahuan adalah kuasa. Dengan kata lain, pengetahuan sendiri memberi ruang untuk memanifestasikan kekuasaan dalam suatu institusi baik itu individu atau lembaga sosial, komunitas, dan sebagainya tidak terlepas juga kerajaan. Demikian pula kemudian kekuasaan akan mereproduksi pengetahuan yang baru. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pemahaman yang sangat berbeda dan bertentangan dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif hubungan internasional, yaitu, dari sudut pandang Realis, Liberalis, Marxis atau Weberian. Kekuasaan bukan sebatas fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasari pada penguasaan kapital ataupun manipulasi ideologi seperti yang dikatakan oleh kaum Marxis, bukan pula hanya sebatas memiliki alutsista dan aliansi lebih banyak seperti yang dikatakan kaum Realis, juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma seperti yang dikatakan oleh Weber (Russel 2002, 793)

Dalam bukunya *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan lima usulan sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan kekuasaan, yaitu (M. Foucault 1998, 94) Pertama, *Power* bukanlah sesuatu yang diperoleh, dicapai, dimiliki atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau mungkin punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dalam hubungan yang terus bergerak. Kedua, *Power relation* bukanlah relasi struktural hierarkis yang mengandaikan ada yang menguasai / mengendalikan dan ada yang dikuasai / dikendalikan. Ketiga, kekuasaan datang dari bawah, yang menganggap tidak ada lagi oposisi biner karena kekuasaan mencakup keduanya. Keempat, relasi kuasa bersifat disengaja. Kelima, di mana ada kekuatan, di situ juga ada resistensi atau perlawanan. Dan *resistence* tidak berada di luar hubungan kekuasaan, semua orang berkuasa, tidak dapat keluar darinya.

Sejarah pengetahuan disebut Foucault sebagai *episteme*, yakni suatu pengetahuan yang otoritatif dan legitimasi pada suatu masa tertentu. Penyelidikan sejarah ini bertolak dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan (pernyataan-pernyataan atau konsep-konsep) terorganisir secara tematis dan empirik sehingga ia menjadi otoritatif dan legitimasi dalam menerangkan segala sesuatu. Struktur pengetahuan yang otoritatif, terlegitimasi dan melegitimasi ini mempengaruhi pelbagai praktik sosial dan individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertingkah laku sebagai sebuah individu.

Gambar 2. Ratu Elizabeth di Sampul Majalah People



Sumber : Pinterest, n.d.

Struktur pengetahuan yang otoritatif, terlegitimasi dan melegitimasi ini mempengaruhi pelbagai praktik sosial dan individu, baik cara berpikir, berbicara, maupun bertingkah laku sebagai sebuah individu. Sebagai contoh nyata, di mata rakyat Inggris dan Persemakmuran, *Your Majesty Queen Elizabeth II* tak hanya sosok yang dipandang atau dikagumi sebagai kepala negara semata. Yang Mulia Elizabeth II dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku rakyatnya dan juga paradigma masyarakat dunia. Salah satu faktornya ialah sang Ratu telah menjadi kepala negara Inggris dan negara

anggota Persemakmuran terhitung lebih dari 68 tahun, dan citra sang Ratu sangatlah positif. Jikalau skandal dan konflik yang terjadi antara Putri serta Pangeran Inggris ataupun anggota wangsa Windsor lainnya bisa menjadi topik pembahasan dan konsumsi publik, jelas tidak demikian halnya dengan sang Ratu. Ia dicap teramat jarang berbicara kepada media dan kerap kali diberitakan berkomunikasi melalui “kode-kode” rahasia serta gestur tubuh yang diperlihatkannya. Hal ini menambah poin pada asumsi bahwa terdapat semacam permainan wacana atau diskursus kekuasaan di tengah-tengah pusat kekuasaan Inggris (Enesca 2020).

Titel “*Global Personality Brand*” yang disandang Ratu Elizabeth II memisahkan kekuasaannya tersendiri dari sisa bangsawan di Istana Buckingham. Namun, di balik merek kepribadian yang kuat ini, harus ada semacam hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan akan wacana yang melegitimasi monarki individu Ratu Elizabeth. Keunikan tersendiri ketika hal-hal yang tidak bisa Ratu katakan secara terang-terangan dengan bahasa kemudian Ratu katakan diam-diam melalui pakaiannya, posisi tasnya juga bahasa tubuhnya. Hal-hal kecil tersebut sangat cukup menggerakkan seluruh keamanan Buckingham Palace dalam alarm yang terkoordinasi jika sesuatu terjadi (Enesca 2020). Kekuasaan yang dikatakan Foucault itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan secara eksplisit didefinisikan. Yang dimaksud ialah wacana yang memengaruhi legitimasi dan kehidupan (M. Foucault 1977, 95)

Terminologi kekuasaan ataupun kedaulatan dalam pengertian Foucauldian tidak lagi terbatas (*limited*) dalam artian yang sempit seperti wilayah daratan atau pengakuan, melainkan berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih kompleks. Kekuasaan tidak lagi digambarkan sebagai sesuatu yang negatif ataupun represif, tetapi yang berevolusi dan bereproduksi, yang simbolik dan yang disiplin. Kekuasaan dapat diterima karena ia

berelasi, memproduksi benda-benda, menimbulkan atau memicu kesenangan, membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana.

Saat ini, hikayat keluarga kerajaan tampaknya masih menjadi dasar yang kuat untuk popularitas monarki sebagai fenomena Postmodern. Bahwa banyak skandal baru-baru ini di berbagai media telah menimbulkan noda kecil nan terbatas pada nama baik kerajaan, kemudian menunjukkan bahwa hubungan publik kerajaan terus sangat berhasil dalam membuat orang melupakan fenomena demokratisasi dan membuat mitos cocok dengan apa yang ingin dipercayai masyarakat.

2. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan keunikan latarbelakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kekuasaan monarki Inggris mempertahankan *Commonwealth Nations*?

3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengungkap kekuasaan yang beroperasi di monarki Inggris dalam mempertahankan *Commonwealth Nations*.

4. Manfaat penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil dari penelitian diharapkan bisa berdampak positif baik terhadap akademis maupun praktis. Manfaat akademis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada kaum akademisi terkait topik yang diangkat oleh peneliti. Terutama dalam memahami dunia internasional saat ini, karena hadirnya beragam permasalahan kompleks juga diiringi dengan perkembangan kajian ilmu hubungan internasional. Seperti halnya,

diskursus kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor utama di pusat kekuasaan Inggris di era modernisasi saat ini. Terdapat beragam tujuan di dalam upayanya, yang masih menjadi misteri dengan keseluruhan tradisi yang masih dipegang teguh. Penggunaan teori postmodernisme dalam membedah objek penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih berupa pengembangan pengetahuan dalam ilmu hubungan internasional.

Manfaat praktis yang bisa diterapkan ialah menjadi bahan acuan atau rujukan para pengambil keputusan pada taraf pemerintah Indonesia terkait penggunaan diskursus kekuasaan dengan baik agar kepentingan nasional. Indonesia dapat tercapai dan Indonesia dapat mengembangkan sayap pengaruhnya ke jangkauan wilayah dunia yang lebih luas. Mengingat, banyaknya aspek budaya ataupun aspek simbol yang bisa digunakan oleh Indonesia, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya bisa mendunia.

5. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode genealogi yang akan dianalisis secara kualitatif. Metode genealogi merupakan pendekatan keempat dalam *culturalstudies* yang kerap disebut Arkeologi Pengetahuan (Lubis 2014). Genealogi pada mulanya merupakan studi tentang asal-usul dan sejarah keluarga. *Genealogists* menyusun daftar leluhur, yang mereka susun dalam bagan silsilah atau bentuk tertulis lainnya. Kata genealogi berasal dari dua kata Yunani — yang satu berarti "ras" atau "keluarga" dan yang lainnya "teori" atau "sains". Demikianlah ia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sejarah keluarga.

Tetapi, genealogi yang dimaksudkan oleh Foucault merupakan metode penelusuran diskursus *discourse analysis* atau wacana-wacana yang membentuk realitas sosial sebagai fokus utama penelitian. Genealogi mencari tahu bagaimana kekuasaan

beroperasi di balik berbagai fenomena sosial. Seperti yang dibahas Foucault dalam esainya "*Nietzsche, Genealogy, History*", gagasan silsilah Foucault sangat dipengaruhi oleh pekerjaan yang telah dilakukan Nietzsche pada pengembangan moral melalui kekuasaan. Dari kacamata Foucault, genealogi merupakan sebuah proses yang mengungkapkan jejak pengaruh kekuasaan terhadap kebenaran. Sumber yang digunakan dalam genealogi biasanya berasal dari arsip dan dokumentasi di masa lampau.

Sedangkan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata, dan gambar namun bukan angka-angka kuantitas. Dapat pula berupa kata-kata tertulis atau verbal dari orang-orang, serta sikap yang dapat diamati. Seluruh yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti entah dari narasumber ataupun perilaku yang bisa diamati (Priyadi 2008). Metode penelitian ini berdasar pada aspek historis, menggunakan genealogi sebagai metodologi penelitian yang men-dekonstruksi sejarah. Tahapan metode dan metodologi penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dekonstruksi atau penelusuran kekuasaan yang beroperasi dibalik fenomena kebenaran absolut yang diterima sebagai pengetahuan (kritik atas sejarah dan keabsahannya), dan yang terakhir interpretasi.

Menurut Jacques Derrida (2008), sejarah metafisika terkait erat dengan dominasi dan penekanan penulisan yang sistematis. Oleh karena itu, harus lebih kritis dalam merekonstruksi sejarah. Pada penjelasannya, Derrida menerangkan bahwa dekonstruksi melihat semua tulisan sebagai sejarah yang kompleks, proses budaya yang berakar pada hubungan teks satu sama lain dan dalam institusi dan konvensi penulisan, dan bahwa bahasa beroperasi dengan cara yang halus dan sering kali kontradiktif, sehingga kepastian akan selalu luput dari kita. Intinya sejarah bukanlah sesuatu yang absolut sehingga tidak dapat direkonstruksi kembali kebenarannya secara ilmiah. Dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, maka dapat dikatakan bahwa penulisan kembali sejarah adalah puncak

segala-galanya. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah (*histoire-recite*), sejarah sebagaimana ia dikisahkan, dalam mencoba menangkap dan memahami sejarah sebagaimana ia terjadi (*histoire-realite*) (Derrida 2008, 2).

Untuk Derrida, metafisika, terlepas dari semua perbedaan, tidak hanya dari Plato hingga Hegel (bahkan termasuk Leibniz) tetapi juga, di luar batas-batas ini, dari pra-Socrates hingga Martin Heidegger, selalu menetapkan teori kebenaran secara umum ke "logo" atau "Symbol." Dalam sejarah ini, menulis secara sistematis dibedakan dari, dan menurut posisi inferior dalam kaitannya dengan, domain pidato. Bagi Derrida, yang, di sini, menunjukkan pengaruh Martin Heidegger, metafisika "logosentris" atau "fonosentris" ini terkait dengan penentuan historis makna dari subjek yang berada di tempat umum. Derrida, dalam bukunya yaitu "*Cogito and History of Madness*" (1963), bahwa tidak mungkin bagi sejarawan manapun untuk keluar dari lingkaran metafisik tertutup dari tatanan alasan.

Oleh karena itu, bacaan dekonstruktif mengandung isi bacaan reproduktif yang "dominan" dan isi bacaan produktif yang "kritis." Bacaan pertama, yang Derrida sebut sebagai "*double commentary*" atau dalam bahasa Prancisnya yakni "*commentaire redoublant*," dan merekonstruksi arti dari suatu bagian tertentu sesuai dengan prosedur yang dibagikan oleh pembaca dekonstruktif dengan pembaca biasa. Bacaan kedua, yang disebutnya sebagai "bacaan kritis," atau "penafsiran aktif," bergerak ke penyebaran makna yang telah ditentukan oleh bacaan pertama. Dalam pembacaan ganda atau "isyarat ganda." Derrida menggunakan interpretatif klasik norma dan praktik dan, pada saat yang sama, untuk meniadakan kekuatan mereka untuk "mengontrol" teks, untuk benar-benar menafsirkan teks sebagai sesuatu yang menentukan, dan untuk "menyebarkan" teks menjadi serangkaian makna yang "tidak dapat diputuskan."

Tahapan tahapan genealogi dalam penelusuran data dan fakta terkait genealogi kekuasaan monarki Inggris, peneliti petakan dalam beberapa tahapan;

- 1 Penelusuran runutan asal usul kekuasaan; bagian ini dilakukan melalui pembacaan ganda terhadap literasi-literasi kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud ialah pendisiplinan pengetahuan (*disciplinary power*) dan pendisiplinan tubuh (*governmentality / bio power*).
- 2 Penelusuran runutan historis kekuasaan monarki konstitusional Inggris, melalui strategi tekstual.
- 3 Mengungkap relasi kuasa pengetahuan dan kekuasaan pada monarki Inggris.

1) Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut John Cresswell, penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berbasis metodologi penyelidikan yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Creswell 2013, 4-5). Peneliti membangun gambaran holistik yang kompleks, menganalisis kata, melaporkan pandangan rinci tentang informasi, dan melakukan penelitian dalam suasana alami. Penelitian eksplanatori didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel (Nachmias 1997, 10).

Penelitian kualitatif adalah payung yang mencakup beberapa bentuk metodologi penyelidikan yang membantu kita memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial dengan gangguan sesedikit mungkin terhadap pengaturan alam. Diasumsikan bahwa makna dimediasi melalui persepsi peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami situasi dalam keunikannya sebagai bagian dari konteks tertentu dan interaksi yang ada di dalamnya (Conway, 2006). Ada berbagai metode pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif, termasuk observasi, analisis tekstual atau visual (misalnya dari buku atau video) dan wawancara (individu atau kelompok).

Penelitian ini bertumpu pada pertanyaan mendasar mengapa, misalnya "Mengapa Inggris masih bisa mempertahankan Persemakmuran?" Dan pada saat itu, peneliti ingin menjelaskan penyebab suatu peristiwa. Untuk alasan ini, ia harus diidentifikasi dengan variabel yang berbeda di luar masalah untuk mengkonfirmasi penyebab masalah. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi penyebab terjadinya suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian penjelasan ini juga disebut sebagai penelitian konfirmatori (*Confirmatory research*) dan makin dikenal sebagai penelitian korelasional (*Correlational research*).

“Correlational research involves collecting data in order to determine whether, and to what degree, a relationship exists between two or more quantifiable variables”

“Research that uses classification type independent variables is known generally as correlational research” (Conway 2006)

2) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data penelitian dapat dicari dari berbagai sumber. Sumber data dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam buku Ulber Silalahi (Silalahi 2009, 289) mengatakan yang termasuk sumber data yang utama atau primer adalah objek atau dokumen asli dari pelaku yang disebut informasi tangan pertama (*first hand information*) yaitu informasi yang diperoleh ketika peristiwa tersebut terjadi. Ada berbagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, termasuk observasi, analisis tekstual atau visual (misalnya dari buku atau video) dan wawancara (individu atau kelompok).

Data yang dihasilkan dari pencarian sumber data primer mencakup wawancara, dokumen historis dan hukum, hasil percobaan, data statistik, lembar penulisan kreatif dan

objek seni. Sedangkan untuk data sekunder juga dapat berupa artikel di media masa atau majalah, buku, artikel dalam jurnal ilmiah yang menganalisis ataupun mengkritisi penelitian asli lainnya, data-data statistik, laporan, arsip, dan publikasi yang diambil dari sebuah instansi atau pemerintah, analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei sebelumnya telah diterbitkan, database data yang ada dari penelitian sebelumnya, notulensi mengenai acara resmi, dan sebagainya (Silalahi 2009, 291). Data yang dikumpulkan ialah berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para narasumber atau informan, serta pengumpulan data sekunder melalui studi literatur mulai dari buku, jurnal-jurnal ilmiah atau materi-materi tertulis lainnya yang memuat informasi tentang bahasan dan masalah penelitian ini.

3) **Teknik Validasi Data**

Validasi data dalam penelitian sangat penting untuk menguji derajat kepercayaan, keabsahan dan kesahihan dalam kebenaran suatu penelitian. Karena proses pengumpulan data penelitian perlu melalui prosedur validasi data yang nantinya akan menjadi bahan rujukan penelitian. Validasi data pada penelitian ini peneliti menggunakan prosedur triangulasi. Menurut Julia *et al.* (2019, 479-480) triangulasi adalah teknik validasi data yang dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran hipotesis konstruk atau analisis yang peneliti timbulkan sendiri dengan cara membandingkannya dengan hasil orang lain. Berbeda dengan Denzin dalam Sudarman Darwin (2003, 49), triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama dalam melakukan validasi data dengan metode triangulasi.

Menurut Sudarman (2003, 50) triangulasi sumber data adalah melakukan pengumpulan data membuka peluang untuk menguji bagaimana peristiwa dialami oleh kelompok yang berbeda dari orang lain, pada waktu yang berbeda, dan situasi yang berbeda pula. Intinya validasi sumber data dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber

jenis data yang berbeda-beda untuk menemukan dan menggali data yang sejenis sehingga dapat ditemukan titik keabsahannya. Triangulasi sumber data ini memudahkan peneliti dalam pengakurasian data yang nantinya menjadi bahan rujukan dari skripsi ini.

6. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, di mana setiap bab akan terdapat sub-bab yang merupakan bahasan yang lebih detail yang ada di dalam penelitian ini. Bab I ialah pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II adalah kajian pustaka yang terdiri atas tinjauan pustaka, kerangka teoritis *power/knowledge* (*disciplinary power* dan *biopower*) Michel Foucault beserta operasionalisasi teori dalam kerangka pemikiran, dan hipotesis. Bab III merupakan pembahasan mendetail mengenai genealogi kekuasaan yang beroperasi dalam monarki Inggris dalam mempertahankan *Commonwealth Nations*. Penelitian ini akan ditutup pada Bab IV yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.